

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi mengenai keterlibatan veteran militer dalam jajaran dewan eksekutif perusahaan telah menjadi perhatian selama beberapa tahun terakhir. Termasuk di Indonesia, keterlibatan veteran militer dalam bisnis masih cukup dominan. Terlibatnya pihak militer dalam bisnis Indonesia diawali pada masa pemerintahan presiden Soeharto, beliau merupakan seorang jenderal besar TNI yang menjadi presiden dengan masa jabatan paling lama yaitu selama 31 tahun. Pada era kepemimpinannya, jabatan penting perusahaan banyak diisi oleh personil militer berpangkat tinggi (Crouch, 1975).

Dominasi koneksi militer masih terus berlanjut hingga turunnya presiden Soeharto dari jabatan pada tahun 1998 membuat pemerintah yang baru berusaha untuk meminimalisir intervensi pihak militer dalam ranah bisnis (Xueying, 2014). Hal tersebut ditandai dengan terbitnya undang-undang reformasi militer No 34 tahun 2004 dimana pemerintah melarang keterlibatan pihak militer dalam dunia bisnis dan harus mengambil alih seluruh bisnis yang ada pada tahun 2009 (HRW, 2010). Namun, undang-undang tersebut gagal terpenuhi (Misol, 2010). Keterlibatan veteran militer militer dalam bisnis Indonesia masih sangat terasa. Tercermin dari penelitian oleh Harymawan (2018) bahwa hanya terdapat 5 koneksi militer pada sampel perusahaan tahun 2004 dan terus meningkat menjadi 13 koneksi pada tahun 2012. Pada perusahaan Indonesia, veteran militer berpangkat tinggi banyak

menduduki posisi dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan pemimpin dan pemegang peran sentral dalam tata kelola perusahaan, oleh karena itu veteran militer akan ditempatkan pada posisi tersebut agar setara dengan pangkatnya pada saat masih menjadi personil militer. Miller (2014) mengungkapkan bahwa terdapat persamaan antara menjalankan perusahaan dan memimpin pasukan militer, dimana seorang jenderal dan pemimpin perusahaan memiliki nilai, karakter, dan tanggung jawab yang sama.

Keterlibatan mantan personil militer sebagai dewan komisaris mencerminkan adanya sesuatu yang istimewa dari veteran militer dalam kaitannya dengan dunia bisnis. Terdapat dua pandangan yang dapat menjelaskan mengapa seseorang dengan latar belakang militer memiliki kecenderungan untuk direkrut menjadi dewan komisaris perusahaan. Pertama, koneksi yang dimiliki oleh mantan perwira militer memiliki potensi untuk dimanfaatkan (Krueger, 1974). Koneksi tersebut membantu perusahaan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus seperti memperoleh ijin impor dan ekspor, mendapat hak monopoli, konsensi hutang, dan bunga hutang yang lebih rendah. (Crouch, 1988; Harymawan, 2018; Lowry, 1996; Mietzner & Misol, 2012). Pemanfaatan koneksi tersebut akan semakin kuat di negara berkembang, seperti Indonesia (Habib dkk., 2017).

Kedua, karena nilai, karakter, dan kepribadian yang dimiliki oleh personil militer. Studi oleh Franke (2001) menjelaskan bahwa pendidikan militer membentuk kepribadian personilnya menjadi lebih setia, berdedikasi, rela berkorban, dan berfokus pada kepentingan kelompok. Law & Mills (2017) mengungkapkan bahwa veteran militer memiliki kemampuan kepemimpinan yang

baik, mereka berintegritas dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Disisi lain, penelitian tentang karakteristik veteran militer di Indonesia juga menunjukkan hal yang sama dalam hal kepemimpinan, namun mereka kurang transparan guna menutupi koneksi-koneksi yang dimiliki (Harymawan, 2018).

Beberapa literatur telah mendokumentasikan pandangan pertama terkait keuntungan yang di dapat dari koneksi militer. Harymawan (2018) menemukan bahwa perusahaan dengan koneksi militer mendapatkan keuntungan dari koneksi yang ada dalam bentuk tingkat bunga hutang yang lebih rendah. Lebih lanjut, Harymawan (2020) mendokumentasikan perusahaan dengan koneksi militer memiliki tingkat pengungkapan yang lebih rendah untuk menutupi manfaat khusus yang didapat dari koneksinya sehingga cenderung tidak memilih auditor empat besar. Sejalan dengan temuan tersebut, Chen dkk. (2021) juga menemukan dewan dengan koneksi militer cenderung tidak mengungkapkan informasi lingkungan perusahaan karena kurangnya kemampuan dan keinginan mereka untuk mengkomunikasikannya.

Disisi lain, beberapa penelitian juga telah mendokumentasikan pandangan kedua terkait karakteristik dari veteran militer dalam jajaran dewan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan. Law & Mills (2017) menemukan manajer dengan koneksi militer lebih patuh terhadap peraturan dan tidak melakukan penghindaran pajak karena termasuk perbuatan yang tidak etis. Koch-Bayram & Wernicke (2018) mendokumentasikan CEO dengan koneksi militer memegang teguh nilai integritas, loyalitas, dan taat terhadap aturan, sehingga cenderung tidak ingin terlibat dalam kecurangan pelaporan keuangan yang menyalahi regulasi

dalam U.S. GAAP. Selanjutnya, Nasih dkk. (2019) menemukan bahwa dewan dengan koneksi militer mampu meningkatkan pengungkapan CSR pada perusahaan Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh jiwa kepemimpinan dan kemampuan organisasi veteran militer yang baik dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dan dianggap mampu meningkatkan performa perusahaan termasuk meningkatkan pengungkapan CSR. Penelitian terbaru oleh Ullah dkk. (2021) juga menemukan bahwa keberadaan CEO militer dapat memitigasi konflik agensi dan memilih keputusan investasi yang efisien karena kepribadiannya yang loyal dan tidak befokus pada kepentingan pribadi.

Dua pandangan terkait koneksi militer tersebut mendorong peneliti untuk menguji pengaruh koneksi militer dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan. Disatu sisi, veteran dapat memanfaatkan koneksinya untuk menutupi ketidakmampuan perusahaan dalam menjalankan dan melaporkan informasi terkait kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan. Namun, disisi lainnya, veteran militer juga dikenal memiliki karakteristik yang loyal, rela berkorban, berintegritas, patuh terhadap regulasi, dan lebih mengutamakan kepentingan publik. Berbekal dua pandangan tersebut, peneliti berargumen bahwa keberadaan dewan komisaris dengan koneksi militer dapat memastikan direksi perusahaan telah menjalankan dan melaporkan informasi tentang kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau malah tidak sama sekali.

Selain karakteristik dewan komisaris, komite pendukung dewan komisaris dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik juga merupakan salah satu faktor

yang dapat membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Beberapa komite pendukung dewan komisaris adalah komite audit, komite CSR, dan komite manajemen risiko. Beberapa penelitian telah mendokumentasikan keberadaan komite audit berhubungan positif dengan pengungkapan CSR (Appuhami & Tashakor, 2017; Ho & Taylor, 2013; Khan dkk., 2013; Said dkk., 2009), karena komite audit dapat memastikan objektivitas laporan keuangan melalui pelaporan pengungkapan CSR yang lebih luas (Khan dkk., 2013). Namun, hasil penelitian (Haniffa & Cooke, 2005; Madi dkk., 2014; Suttipun, 2021) menemukan hasil yang berbeda. Selain komite audit, keberadaan komite CSR juga telah banyak diteliti berhubungan positif dengan pengungkapan CSR (Fuente dkk., 2017; Mahmood dkk., 2018; Suttipun, 2021) dan ESG perusahaan (Campanella dkk., 2020). Namun penelitian lain menemukan bahwa komite CSR tidak mempengaruhi aktivitas CSR (Cuadrado-Ballesteros dkk., 2017) atau pengungkapan ESG perusahaan (Michelon & Parbonetti, 2012).

Disisi lain, hanya penelitian Musallam (2018) yang menguji hubungan antara komite manajemen risiko dengan pengungkapan CSR. Padahal, keberadaan komite manajemen risiko dapat memperluas kemampuan dewan komisaris dalam mengelola risiko (Beasley dkk., 2006) dan memahami praktik pelaporan CSR (Jan dkk., 2008). Literatur mengenai keberadaan komite pendukung dewan komisaris dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan masih didominasi oleh komite audit dan komite CSR. Terlebih lagi Indonesia tidak memiliki komite CSR. Oleh karena itu, peneliti berargumen bahwa keberadaan komite manajemen risiko dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi dan memberikan saran kepada

dewan direksi terkait informasi apa saja yang seharusnya diungkapkan untuk mengurangi risiko tidak terpenuhinya kebutuhan informasi para stakeholder atau justru menyaring informasi dan tidak mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan yang dapat meningkatkan risiko perusahaan.

Dalam pengujian argumen yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan seluruh sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak *delisting* selama tahun 2010 hingga 2018. Rentang tahun tersebut dipilih karena merupakan masa sebelum industri terdampak pandemi covid-19. Perusahaan yang berada dalam sektor industri keuangan (SIC 6) akan dikeluarkan dari sampel penelitian mengingat terdapat perbedaan regulasi untuk industri tersebut dengan industri lainnya. Peneliti akan menggunakan teknik analisis *Ordinary Least Square* (OLS) dan *Moderate Regression Analysis* (MRA). Penelitian ini mengacu pada standar *Global Reporting Initiative* (GRI) dalam menentukan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan, karena GRI merupakan salah satu pedoman global yang sering digunakan dalam penelitian laporan keberlanjutan, CSR, dan ESG (Fuente dkk., 2017; Manita dkk., 2018; Ratri dkk., 2021).

Kebaruan penelitian ini adalah berfokus pada koneksi militer dewan komisaris karena untuk dapat memaksimalkan koneksi dan karakter yang dimiliki, veteran militer harus menduduki posisi tertinggi di dalam perusahaan. Serta menambahkan variabel moderasi komite manajemen risiko sebagai komite pendukung tugas dewan komisaris. Kedua kebaruan tersebut sesuai dengan pedoman tata kelola perusahaan terbuka bahwa dewan komisaris merupakan

pemegang peran sentral dalam tata kelola perusahaan di Indonesia. Dewan komisaris bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam proses pengambilan keputusan (OJK, 2014). Salah satu keputusan yang diambil adalah terkait dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan. Dewan komisaris harus memiliki kapasitas dan integritas untuk melaksanakan tanggung jawabnya, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku (IFC, 2018). Selain itu, dewan komisaris juga direkomendasikan untuk membentuk komite manajemen risiko yang bertugas membantu dewan komisaris dalam menetapkan struktur tata kelola risiko, menentukan tingkat toleransi risiko, dan memantau efektivitas manajemen risiko serta sistem pengendalian internal.

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan dewan komisaris serta pembentukan komite pendukung dewan komisaris. Penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi para pemilik modal dalam memilih perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab. Terakhir, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan terkait tata kelola dan keberlanjutan perusahaan, serta mendukung teori *upper echelons* dan teori *stakeholder*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti antara lain:

1. Apakah koneksi militer dewan komisaris mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan?

2. Apakah komite manajemen risiko memoderasi pengaruh koneksi militer dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris dari pengaruh koneksi militer dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris dari peran moderasi komite manajemen risiko dalam pengaruh koneksi militer dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi baik secara praktik maupun teoritis:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah kajian literatur terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan yang posisi dewan komisarisnya dijabat oleh mantan personil militer dan yang memiliki komite manajemen risiko. Sepanjang pengetahuan peneliti, belum terdapat penelitian yang menghubungkan secara langsung antara koneksi militer dewan komisaris dan komite manajemen risiko dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan. Selain

itu, hasil penelitian ini akan memperdalam kajian mengenai teori *upper echelon*. Hal ini untuk mengkonfirmasi kesesuaian antara karakteristik pemimpin perusahaan dimana dalam penelitian ini adalah mantan personil militer dengan keputusan korporasi dalam bentuk pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Serta kajian tentang teori *stakeholder*, yang berperan dalam menjelaskan peran pemantauan dan pengendalian risiko oleh komite manajemen risiko sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk melindungi dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini berkontribusi sebagai bahan pertimbangan pemilihan dewan perusahaan yang memiliki koneksi militer dan pembentukan komite manajemen risiko, terutama terkait dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk menangkap pola pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan yang terkoneksi militer dan memiliki komite manajemen risiko. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi investor dan kreditur dalam memilih perusahaan yang akan didanainya.

1.5 Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berfokus pada pengaruh koneksi militer dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan serta peran moderasi dari komite manajemen risiko pada

perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2018. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari *website* BEI, perusahaan, GRI, serta menggunakan data dari database OSIRIS. Dasar teori yang digunakan untuk mengembangkan penelitian ini adalah teori *upper echelon* dan teori *stakeholder*.

1.6 Sistematika Tesis

Sistematika penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Secara sederhana, penulisan penelitian ini dibagi menjadi:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang berfokus pada penjelasan tentang fenomena keberadaan dewan perusahaan yang terkoneksi militer dan kurangnya penelitian terkait keberadaan komite manajemen risiko. Serta bagaimana pemilihan organ tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan. Bagian ini juga menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian. Bagian ini diakhiri dengan penjelasan sistematika penulisan penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai teori dasar yang digunakan sebagai acuan pembahasan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori *upper echelon* dan teori *stakeholder* sebagai teori dasar yang menjelaskan pengaruh antar variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya pada bagian ini akan dijelaskan penelitian-

penelitian terdahulu yang digunakan serta diakhiri dengan kerangka konseptual penelitian ini.

Bab 3 Metode Penelitian.

Pada bagian ini dijelaskan rasionalitas dari pemilihan suatu metode penelitian tertentu. Berikutnya akan dijelaskan objek dan subjek dari penelitian ini. Penjelasan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini juga disebutkan di bagian berikutnya diikuti dengan metode yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dari penelitian ini.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan.

Pada bagian ini dijelaskan hasil dari pengujian *ordinary least square* dan *moderate regression analysis* dengan menggunakan bantuan *software* STATA 14.0. Penjelasan terkait hasil pengujian statistic deskriptif, korelasi pearson, uji koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik t juga akan dijelaskan pada bagian ini. Lebih lanjut, pada bagian ini juga menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab 5 Simpulan dan Saran.

Pada bagian ini akan dijelaskan simpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh terkait pengaruh koneksi militer dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan serta peran moderasi dari komite manajemen risiko. Pada bagian ini juga berisi saran bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pembuat kebijakan.